



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 109/Pdt.P/2018/PN Wns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

**ANDI TITIN PRANITA**, Tempat tanggal lahir di Lapai, 28 September 1990, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Sikkojang RT/RW 002/002 Kel/Ds. Mariorilau Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 16 Oktober 2018 dalam Register Nomor 109/Pdt.P/2018/PN Wns, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan dalam Akta Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berdomisili di Sikkojang, RT/RW 002/002, Kel/Ds Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 7312016809900002 dan Kartu Keluarga No.7312010508100538;
2. Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil kabupaten Soppeng Nomor : 478.2/351/IST/VI/2006 tertanggal 8 Juni 2006 tercatat atas nama **ANDI TITIN PRANITA lahir di Lapai pada tanggal 28 Mei 1990** anak dari pasangan suami istri **ayah H. ANDI HANRENG dan Ibu Hj. ANDI SUGIRNAWATI** ;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PN Wns*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Ijazah Menengah atas No. DN-19 Ma 0019611 tertanggal 19 Juni 2009 tercatat atas nama **ANDI TITIN PRANITA lahir di Lapai pada tanggal 28 September 1991 anak dari ANDI HANRENG**;
4. Bahwa antara Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon terdapat kesalahan penulisan **Bulan dan tahun kelahiran** pemohon, sehingga pemohon ingin menyesuaikan perubahan tersebut berdasarkan ijazah pemohon;
5. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan bulan dan tahun kelahiran pemohon berdasarkan ijazah pemohon;
6. Bahwa perubahan tersebut tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;  
Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan bulan dan tahun kelahiran pemohon yang semula **lahir pada tanggal 28 Mei tahun 1990** diubah menjadi **lahir pada tanggal 28 September 1991 anak ke -1 (satu) dari pasangan suami istri ayah H. ANDI HANRENG dan Ibu Hj. ANDI SUGIRNAWATI** sah menurut ketentuan hukum;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Soppeng untuk mencatat perubahan tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

### ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7312016809900002 atas nama ANDI TITIN PRANITA;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga No. 7312010508100538 tanggal 05-07-2018 atas nama kepala keluarga ANDI WAHYUDDIN;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 478.2/351/IST/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 atas nama ANDI TITIN PRANITA;
4. Bukti P-4 : fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-1Ma 0019611 tanggal 19 Juni 2009 atas nama ANDI TITIN PRANITA;
5. Bukti P-5 : fotocopy Formulir Pelaporan Pembetulan Akta;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi AKMAL

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sikkojang Kel/Ds. Mariorilau Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon mengenai bulan dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari orang tua H. Andi Hanreng dan Hj. Andi Sugirawati;
- Bahwa setahu saksi, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis bulan Mei tahun 1990;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut sesuai yang sebenarnya yaitu bulan September tahun 1991;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

## 2. Saksi LUKMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai sepupu Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sikkojang Kel/Ds. Mariorilau Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
  - Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon mengenai bulan dan tahun kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari orang tua H. Andi Hanreng dan Hj. Andi Sugirawati;
  - Bahwa setahu saksi, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis bulan Mei tahun 1990;
  - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut sesuai yang sebenarnya yaitu bulan September tahun 1991;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi AKMAL dan saksi LUKMAN yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Watansoppeng, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan perubahan nama dan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Sikkojang RT/RW 002/002 Kel/Ds. Mariorilau Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Watansoppeng adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa KTP, bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga Pemohon diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon lahir pada bulan September tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir pada bulan Mei tahun 1990;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa Ijazah Pemohon diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon lahir pada bulan September tahun 1991;

Menimbang, bahwa mencermati bukti **P-1** sampai dengan **P-4** tampak terdapat perbedaan penulisan bulan dan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan/perbaikan akta ini bagi Pemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Soppeng untuk melaporkan pembetulan akta tersebut, sebagaimana bukti **P-5**, namun pembetulan ini tidak dapat diproses lebih lanjut karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri terkait hal dimaksud (vide Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta bahwa sepengetahuan saksi-saksi, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis bulan Mei tahun 1990 dan Pemohon hendak memperbaiki bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut sesuai yang sebenarnya yaitu bulan September tahun 1991, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa orang yang bernama ANDI TITIN PRANITA lahir pada bulan Mei tahun 1990 yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta nama ANDI TITIN PRANITA lahir pada bulan September tahun 1991 yang tercatat pada Ijazah Pemohon adalah orang yang satu dan sama yaitu Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain, dan menurut Pengadilan nama-nama tersebut pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama tetapi terdapat perbedaan penulisan bulan dan tahun kelahiran disebabkan karena adanya kesalahan penulisan dan untuk selanjutnya Pemohon akan memperbaiki seluruh identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon sesuai yang sebenarnya yaitu lahir pada bulan September tahun 1991;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perbaikan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon khususnya Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), dengan maksud untuk keseragaman data Pemohon dan menghindari permasalahan di kemudian hari dan memperhatikan asas

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesopanan dan kepatutan serta menyeragamkan identitas tersebut pada semua dokumen kependudukan Pemohon, sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi di masa yang akan datang, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon agar memberi izin untuk dilakukan perbaikan/penyesuaian pada dokumen kependudukan Pemohon, khususnya terhadap Kutipan Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis **bulan Mei tahun 1990** diubah dan menjadi **bulan September tahun 1991**, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kab. Soppeng dikaitkan dengan ketentuan bahwa perubahan nama dan pencatatan kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor Nomor 24 Tahun 2013, dan permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2), maka wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatatkan dalam register untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan dan tahun kelahiran Pemohon semula tertulis **bulan Mei tahun 1990** diubah dan seterusnya menjadi **bulan September tahun 1991**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan atau orang lain yang ditunjuk, untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kab. Soppeng, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp271.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 23 OKTOBER 2018 oleh  
RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri  
Watansoppeng, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu  
juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh  
MUH. IDRUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Watansoppeng, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

MUH. IDRUS, S.H.

RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp125.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp 5.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00 +
J u m l a h	: Rp271.000,00
	( <i>Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah</i> )

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PN Wns